

Peningkatan Peranan Desa dalam Perluasan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

Dwi Budi Santoso^{1,2}, Eddy Suprpto¹, Hidsal Jamil^{1,2}, Adinda Putri Nuraini^{1,2}

¹Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

²Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK)

ABSTRACT

Desa Saptorenggo masih dihadapkan persoalan rendahnya jangkauan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan berfokus pada aspek pembiayaan, kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada perangkat Desa Saptorenggo dalam: i) peningkatan ketepatan penentuan prioritas program yang dibiayai melalui APBDes; dan ii) peningkatan kemampuan memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Sosial. Untuk mencapai tujuan kegiatan, peneliti menggunakan metode participatory rural appraisal (PRA) yang secara operasional diselenggarakan dengan pendekatan diskusi kelompok terarah dan pendampingan teknis berkala, untuk mengurai persoalan lemahnya jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan pada aspek pembiayaan. Dalam kegiatan ini, peningkatan ketepatan penentuan prioritas program pendidikan dan kesehatan melalui APBDes dilakukan dengan memetakan program yang selaras dengan fokus pembangunan nasional (cross-cutting issues) dan pemutakhiran basis data kependudukan yang dijadikan sebagai dasar penentuan kelompok penerima manfaat. Sedangkan, peningkatan kemampuan memperoleh sumber pembiayaan alternatif dilakukan dengan mengidentifikasi program pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan NGO. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif juga telah diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang termuat dalam buku saku maupun bahan tayang.

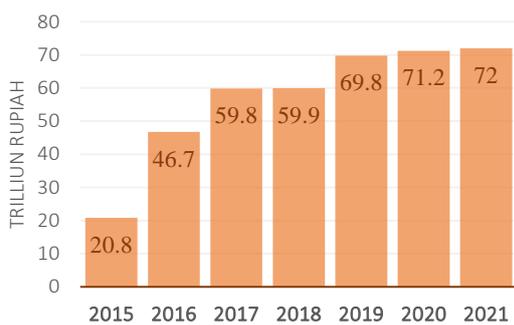
KEYWORDS Pendidikan, Kesehatan, APBDes, Dana CSR, Dana Sosial.

PENGANTAR

Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peranan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Perluasan layanan pendidikan di wilayah perdesaan mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sekaligus mendorong terjadinya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian yang memiliki tingkat upah lebih tinggi (Liu et al., 2020; Mamun et al., 2021; Purnastuti et al., 2015). Perluasan layanan kesehatan yang menjangkau wilayah perdesaan juga turut mendorong terciptanya penduduk usia produktif yang melimpah seiring dengan semakin tingginya angka harapan hidup (Brousselle et al., 2016; Masters et al., 2017; Stenberg et al., 2016).

Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan tentunya memerlukan investasi yang cukup besar. Dibandingkan dengan daerah perkotaan, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perdesaan relatif lebih mahal dikarenakan sulitnya mencapai skala ekonomi layanan. Kendala geografis yang ditandai dengan pola pemukiman penduduk yang tersebar dan jauhnya jarak pemukiman penduduk ke layanan pendidikan dan kesehatan ditengarai menjadi penyebab sulitnya mencapai skala ekonomi layanan di wilayah perdesaan (Mellor, 2017). Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam memobilisasi investasi atau

sumber pembiayaan pembangunan baik dari sektor publik maupun swasta (Asian Development Bank, 2021). Dalam konteks Indonesia, pembiayaan pembangunan dari sektor publik berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) yang sebagian besar bersumber dari Dana Desa. Total anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat selama periode 2015 sampai dengan 2021 (Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan, 2021), seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Sedangkan, pembiayaan pembangunan pada sektor swasta dapat diperoleh dari Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Sosial. Potensi Dana CSR dan Dana Sosial di Indonesia setiap tahunnya masing-masing mencapai 12 triliun dan 70 triliun (BPMI-Setwapres, 2021; Ghofar, 2015). Kedua sumber pembiayaan pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan layanan pendidikan dan kesehatan.



Sumber: (Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan, 2021)

Gambar 1. Perkembangan Dana Desa 2015–2021

Besarnya potensi pembiayaan pembangunan baik dari sektor publik maupun swasta, ternyata masih belum dibarengi dengan peningkatan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perdesaan, khususnya di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ditinjau dari aspek pendidikan, (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022) mencatat bahwa Desa Saptorenggo masih memiliki skor yang cukup rendah, terutama pada tiga aspek yaitu, yaitu Akses Pendidikan Dasar-Menengah, Akses Pendidikan Non-Formal, dan Akses Pengetahuan Masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari aspek kesehatan, Desa Saptorenggo memiliki tingkat jaminan kesehatan yang cukup rendah. Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (2022) melaporkan, dari total jumlah penduduk Desa Saptorenggo, hanya sekitar 10 hingga 25 persen yang dapat mengakses BPJS. Akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terbatas di Desa Saptorenggo berpotensi menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Rendahnya jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan di Desa Saptorenggo, tidak terlepas dari lemahnya kemampuan dalam memobilisasi sumber pembiayaan pembangunan. Lemahnya kemampuan mobilisasi investasi baik dari sektor publik maupun sektor swasta ditengarai terbatasnya kemampuan, kapasitas, dan dukungan teknis perangkat desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Desa Saptorenggo, tetapi jamak pula ditemukan di desa-desa lain di Indonesia (Santoso et al., 2017; Siagian et al., 2016). Dugaan ini sejalan dengan laporan (World Bank, 2020) yang menemukan bahwa tidak semua pemerintah desa di Indonesia mampu menetapkan prioritas pembangunan dalam penggunaan Dana Desa, terutama untuk alokasi layanan pendidikan dan kesehatan. Studi yang sama juga mengkonfirmasi bahwa perangkat desa cenderung belum memiliki pemahaman yang memadai untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar APBDes, seperti pemanfaatan Dana CSR dan Dana Sosial. Padahal, sumber pembiayaan alternatif penggunaannya relatif lebih fleksibel untuk meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan dibandingkan Dana Desa.

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, pengabdian ini berupaya memberikan solusi dari permasalahan pendidikan dan kesehatan tersebut melalui kegiatan pendampingan peningkatan peran pemerintah Desa Saptorenggo dalam memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Terdapat dua tujuan utama yang akan dicapai dalam pendampingan ini: i) peningkatan ketepatan penentuan prioritas program layanan pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBDes; dan ii) peningkatan kemampuan dalam memperoleh sumber pembiayaan alternatif program layanan pendidikan dan kesehatan di luar APBDes.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode participatory rural appraisal (PRA), dimana peneliti terlibat langsung bersama dengan perangkat desa untuk mengurai persoalan lemahnya jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan. Melalui pendekatan ini, peneliti menempatkan perangkat desa bukan sebagai objek penelitian, tetapi subjek penelitian yang memiliki potensi untuk terlibat secara aktif dalam siklus perencanaan, penentuan skala prioritas, penganggaran, dan pemanfaatan hasil pembangunan yang menjadi kewenangan desa (Solano Lara et al., 2018). Dalam pendekatan PRA, peneliti bertindak sebagai mitra, yaitu pihak yang mampu mensinergikan pemahaman teoritis dan konseptual yang dimilikinya dengan pengalaman empiris yang dimiliki perangkat desa dalam peningkatan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan.

Secara teknis, metode participatory rural appraisal (PRA) dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama, peneliti menyelenggarakan diskusi kelompok terarah yang melibatkan seluruh perangkat Desa Saptorenggo untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam penentuan prioritas APBDes dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di luar APBDes. Diskusi kelompok terarah ini diselenggarakan pada 22 Juni 2022 (Shobirin, 2022)



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Gambar 2. Potret Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah

Kedua, peneliti melaksanakan pendampingan teknis (technical assistance) bagi perangkat Desa Saptorenggo. Pendampingan ini menyangkut penajaman basis data kependudukan yang menjadi dasar penentuan prioritas dan pembuatan proposal untuk menjangkau Dana CSR dan Dana Sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program pendidikan dan kesehatan di Desa Saptorenggo. Pendampingan teknis ini berlangsung setiap bulan

selama periode Juni sampai dengan November 2022.



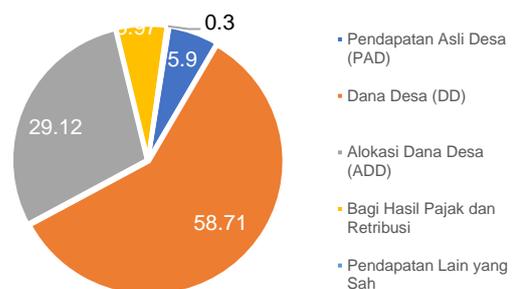
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Gambar 3. Potret Pendampingan Teknis

HASIL DAN DISKUSI

Peningkatan ketepatan penentuan prioritas program yang bersumber dari APBDes

Perkembangan pembangunan Desa Saptorenggo sangat bergantung pada Dana Desa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretaris Desa Saptorenggo 2021), kontribusi Dana Desa sangat dominan, mencapai 59% dari total penerimaan desa. Padahal, peruntukan Dana Desa sendiri diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, dengan fokus pembangunan yang berubah pada setiap tahunnya. Imbasnya, penggunaan Dana Desa menjadi tidak fleksibel, dan tidak jarang, kebutuhan pemerintah desa berbeda dengan fokus pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat (World Bank, 2020).



Sumber: Sekretaris Desa Saptorenggo (2021)

Gambar 4. Komposisi Penerimaan Desa Saptorenggo, 2021

Untuk mengatasi kendala fleksibilitas pemanfaatan Dana Desa, peneliti bersama dengan perangkat desa melakukan pemetaan program pendidikan dan kesehatan desa yang selaras dengan fokus pembangunan nasional atau disebut cross-cutting issues. Program penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Paket Penyetaraan SD, SMP, dan SMA dianggap sejalan

dengan fokus pembangunan nasional di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka buta huruf di desa. Program peningkatan aksesibilitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan percepatan penurunan tengkes (stunting) pada anak bayi di bawah lima tahun juga diidentifikasi sebangun dengan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Keberhasilan pemetaan keselarasan program pemerintah desa dan pemerintah pusat yang telah dilakukan, diperkirakan mampu meningkatkan sekitar 32% dari total Dana Desa yang dapat digunakan untuk perluasan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, peneliti bersama dengan perangkat desa membangun basis data yang komprehensif sebagai rujukan dalam alokasi Dana Desa untuk perluasan layanan pendidikan dan kesehatan. Pengembangan basis data yang komprehensif dilakukan dengan melakukan pencocokan antara data kependudukan dengan profil pendidikan dan kesehatan masing-masing rumah tangga di Desa Saptorenggo yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Pengembangan basis data yang komprehensif setidaknya dapat meminimalisir potensi terjadinya exclusion error (orang yang tidak

berhak mendapatkan bantuan tetapi terdaftar sebagai penerima manfaat) maupun inclusion error (orang yang berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat), terutama pada program pendidikan dan kesehatan yang sifatnya menasar kelompok miskin dan kelompok penerima manfaat lainnya yang rentan (Cooper et al., 2020; Hanna & Olken, 2018; Jamil, 2021; Tohari et al., 2019).

Terlepas dari capaian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, kendala utama yang masih belum dapat terselesaikan ialah pemutakhiran basis data seringkali dihadapkan pada perubahan kriteria penerima manfaat program pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perubahan kriteria penerima manfaat ini tentunya menghasilkan basis data yang jauh berbeda. Konsekuensinya, exclusion error dan inclusion error tidak dapat terhindarkan dalam penyaluran program. Untuk itu, pemutakhiran basis data pada tingkat desa perlu melibatkan perguruan tinggi yang memiliki akses ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan ketepatan sasaran program pendidikan dan kesehatan.

Tabel 1. Usulan Program Peningkatan Kualitas SDM yang Dibiayai Melalui Dana CSR dan Dana Sosial

Sumber Pendanaan	Usulan Program Peningkatan Kualitas SDM	
	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan
Dana CSR yang bersumber dari perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan ▪ Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Siswa Miskin atau berprestasi di tingkat Sekolah Dasar hingga Universitas ▪ Pembangunan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non-Formal ▪ Pembangunan dan Pengelolaan Taman Baca ▪ Bantuan Bagi Guru Honorer ▪ Pemberian Bantuan Transportasi Siswa (Mobil/Bus Sekolah) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan ▪ Pemberian Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat Rentan ▪ Penguatan Posyandu dan Pos Kesehatan Desa ▪ Pemberian Mobil Siaga Desa ▪ Pemberian Pelatihan Kepada Kader dan Pengelola Posyandu ▪ Kampanye Pencegahan Stunting
Dana Sosial yang bersumber dari organisasi non-pemerintah (NGO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin atau Yatim Piatu di tingkat Sekolah Dasar hingga Universitas ▪ Pendirian dan Pengelolaan Rumah Pintar atau Rumah Belajar ▪ Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non-Formal (Seperti TPA) ▪ Bantuan Keuangan kepada Guru ▪ Pendampingan Lulus Ujian Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Bantuan Dana Kesehatan Kepada Masyarakat Rentan (Bantuan Tunai) ▪ Layanan Kesehatan Keliling ▪ Pendirian dan Pengelolaan Pos Kesehatan ▪ Penjaminan Biaya Kesehatan Masyarakat Rentan ▪ Kegiatan Kampanye Kesehatan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2022)

Peningkatan kemampuan dalam memperoleh sumber pembiayaan alternatif di luar APBDes

Pemanfaatan Dana Desa yang kurang fleksibel di Desa Saptorenggo menuntut adanya inovasi

pembiayaan melalui mobilisasi sumber pembiayaan alternatif di luar APBDes, seperti Dana CSR (Blowfield, 2007; Waagstein, 2011) dan Dana Sosial (Hartnell, 2020; Kailani & Slama, 2020; Wiepking, 2021), untuk mempercepat pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sama halnya dengan APBDes, program yang dibiayai melalui sumber pembiayaan alternatif perlu mengakomodir kepentingan pihak ketiga. Program yang didanai melalui CSR disesuaikan dengan brand image yang dimunculkan oleh masing-

DAMPAK KEGIATAN

Setelah dilakukan identifikasi program yang potensial dibiayai melalui sumber pembiayaan alternatif, peneliti dan perangkat desa merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tahapan pengajuan kerjasama dengan pihak ketiga. SOP mengenai tahapan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif telah diterbitkan dalam bentuk buku saku (Santoso, Wijaya, et al., 2022) maupun bahan tayang (Santoso, Suprpto, et al., 2022). Adanya rumusan SOP ini mampu memberikan panduan bagi perangkat desa dalam memobilisasi Dana CSR maupun Dana Sosial.

Dalam SOP tersebut, tahapan kerjasama dengan perusahaan dilakukan dengan menempuh tiga langkah secara berurutan, yaitu: i) inventarisasi perusahaan-perusahaan besar yang berada di sekitar Desa Saptorenggo; ii) pendataan calon penerima manfaat; dan iii) penyusunan surat permohonan dan proposal pengajuan Dana CSR yang memuat pendahuluan, permasalahan, tujuan dan sasaran program, kebutuhan biaya, serta rencana pengelolaan.

Sedangkan, tahapan kerjasama dengan NGO ditempuh melalui enam langkah secara berurutan, yaitu: i) inventarisasi NGO yang beroperasi di Kabupaten Malang; ii) pendataan calon penerima manfaat oleh perangkat desa; iii) pembuatan surat rekomendasi atau surat keterangan tidak mampu; iv) penyiapan kelengkapan dokumen calon penerima manfaat yang diserahkan kepada NGO; v) pendampingan survei calon penerima manfaat oleh NGO; dan vi) pendaftaran pribadi oleh calon penerima manfaat untuk beberapa program, seperti beasiswa kuliah.

Di luar capaian tersebut, kendala yang masih dihadapi adalah kepentingan antar perusahaan dan NGO cenderung berbeda satu sama lain. Perbedaan kepentingan ini, apabila tidak dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah desa, akan menimbulkan penyelenggaraan program pendidikan dan kesehatan yang tidak efisien (tumpang tindih).

masing perusahaan. Sedangkan, program yang bersumber dari Dana Sosial disesuaikan dengan misi sosial yang diemban organisasi non-pemerintah (NGO). Berdasarkan hasil identifikasi peneliti bersama dengan perangkat desa, program pendidikan dan kesehatan yang potensial dibiayai melalui sumber pembiayaan alternatif dapat dilihat pada tabel 1.

Untuk menggali sumber pembiayaan alternatif, seperti Dana CSR dan Dana Sosial, pemerintah desa perlu terlibat aktif dalam forum CSR dan asosiasi NGO yang bergerak dalam penghimpunan Dana Sosial di Kabupaten Malang. Evaluasi dampak program pendidikan dan kesehatan desa perlu melibatkan perguruan tinggi untuk menjamin kredibilitas penyelenggaraan program dan meningkatkan kepercayaan penyandang dana terhadap pemerintah desa (mutual trust).



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Gambar 5. Buku Saku Kegiatan Pengabdian Desa Saptorenggo

KESIMPULAN dan SARAN

Kegiatan pengabdian ini didasarkan pada fakta bahwa Desa Saptorenggo masih memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif rendah. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian, terdapat dua poin capaian yang mampu diraih dalam perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Desa Saptorenggo. Pertama, peneliti bersama dengan perangkat desa mampu menentukan prioritas penganggaran program pendidikan dan kesehatan yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat sekaligus dapat didanai melalui APBDes. Kedua, peneliti bersama dengan perangkat desa juga mampu merumuskan SOP yang berisi tahapan pengajuan pendanaan program

pendidikan dan kesehatan yang didanai melalui pihak ketiga, baik oleh perusahaan maupun oleh NGO. Dalam rangka penyempurnaan kegiatan pengabdian ini, terdapat dua agenda kegiatan yang menjadi fokus peneliti ke depan. Pertama, penerapan teknologi yang cepat, akurat, dan sederhana dalam proses pemutakhiran basis data di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, keterlibatan dalam evaluasi dampak program pendidikan dan kesehatan untuk menjamin kredibilitas penyelenggaraan program dan meningkatkan kepercayaan penyandang dana terhadap pemerintah desa (mutual trust).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, yang telah membiayai terselenggaranya kegiatan melalui Dana Penelitian dan Pengabdian (DPP).

REFERENCES

Asian Development Bank. (2021). Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia.

Blowfield, M. (2007). Reasons to be cheerful? What we know about CSR's impact. *Third World Quarterly*, 28(4), 683–695. <https://doi.org/10.1080/01436590701336523>

BPMI-Setwapres. (2021). Optimalkan Manfaat Pengembangan Dana Sosial, Peran Lembaga Resmi Pengelola Zakat dan Wakaf Harus Dimaksimalkan. Kementerian Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalkan_manfaat_pengembangan_dana_sosial_peran_lembaga_resmi_pengelola_zakat_dan_wakaf_harus_dimaksimalkan

Brousselle, A., Benmarhnia, T., & Benhadj, L. (2016). What are the benefits and risks of using return on investment to defend public health programs? *Preventive Medicine Reports*, 3, 135–138. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.11.015>

Cooper, J. E., Benmarhnia, T., Koski, A., & King, N. B. (2020). Cash transfer programs have differential effects on health: A review of the literature from low and middle-income countries. *Social Science & Medicine*, 247, 112806. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112806>

Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan. (2021). Kebijakan Dana Desa 2021.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>

Ghofar, M. (2015). Rp12 triliun dana CSR Indonesia belum dikelola maksimal. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/509654/rp12-triliun-dana-csr-indonesia-belum-dikelola-maksimal>

Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal Basic Incomes versus Targeted Transfers: Anti-Poverty Programs in Developing Countries. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 201–226. <https://doi.org/10.1257/jep.32.4.201>

Hartnell, C. (2020). Philanthropy in Indonesia: A Working paper. <http://www.psjp.org/resources/philanthropy-in-indonesia/>

Jamil, H. (2021). Mungkinkah Universal Basic Income (UBI) Diterapkan Di Indonesia? Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bzkkq3>

Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022). Indeks Desa Membangun. <https://idm.kemendesa.go.id/>

Liu, C., Li, Y., Li, S., Luo, R., Zhang, L., Rozelle, S., Hagist, S., & Hou, J. (2020). The returns to education in rural China: Some new estimates. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 64(1), 189–208. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.12350>

Mamun, S. A. K., Taylor, B. R., Nghiem, S., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2021). The private returns to education in rural Bangladesh. *International Journal of Educational Development*, 84, 102424. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102424>

- Masters, R., Anwar, E., Collins, B., Cookson, R., & Capewell, S. (2017). Return on investment of public health interventions: a systematic review. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 71(8), 827–834. <https://doi.org/10.1136/jech-2016-208141>
- Mellor, J. W. (2017). Rural Education and Health. In *Agricultural Development and Economic Transformation* (pp. 123–133). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65259-7_10
- Purnastuti, L., Salim, R., & Joarder, M. A. M. (2015). The returns to education in Indonesia: Post reform estimates. *The Journal of Developing Areas*, 49(3), 183–204. <https://doi.org/10.1353/jda.2015.0174>
- Santoso, D. B., Saleh, S., Suman, A., & Maski, G. (2017). The effectiveness analysis of grant scheme “POKMAS” toward village community empowerment: a case study on Siak Regency of Riau province. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 10(3), 295. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2017.086626>
- Santoso, D. B., Suprpto, E., Nuraini, A. P., & Wijaya, A. H. Z. (2022). Bahan Tayang Kegiatan Pengabdian : Perluasan Jangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Desa Saptorenggo Melalui Peranan Desa (Patent No. EC00202249470). <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202249470?type=copyright&keyword=Jangkauan+Pelayanan+Pendidikan+dan+Kesehatan+>
- Santoso, D. B., Wijaya, A. H. Z., & Nuraini, A. P. (2022). Perluasan Jangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Desa Saptorenggo Melalui Peranan Desa (Patent No. EC00202273975). <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202273975?type=copyright&keyword=Jangkauan+Pelayanan+Pendidikan+dan+Kesehatan+>
- Sekretaris Desa Saptorenggo. (2021). Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa Saptorenggo Tahun 2021.
- Shobirin, R. (2022). Perluas Jangkauan Pendidikan dan Kesehatan, Tim FEB UB Dampingi Perangkat Desa. *Times Indonesia*. <https://www.timesindonesia.co.id/ketahanan-informasi/425603/perluas-jangkauan-pendidikan-dan-kesehatan-tim-feb-ub-dampingi-perangkat-desa>
- Siagian, B. B., Maryunani, M., Sakti, R. K., & Santoso, D. B. (2016). Efficiency and Effectiveness Analysis of Village Financial Management (VFM) (Case Study Asahan Regency). *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 2(2), 136–151. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2016.002.02.5>
- Solano Lara, C., Fernández Crispín, A., & López Téllez, M. C. (2018). Participatory rural appraisal as an educational tool to empower sustainable community processes. *Journal of Cleaner Production*, 172, 4254–4262. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.072>
- Stenberg, K., Sweeny, K., Axelson, H., Temmerman, M., & Sheehan, P. (2016). Returns on Investment in the Continuum of Care for Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health. In *Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 2): Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health* (pp. 299–317). The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0348-2_ch16
- Tohari, A., Parsons, C., & Rammohan, A. (2019). Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia’s unified targeting system. *Journal of Development Economics*, 140, 127–144. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002>
- Waagstein, P. R. (2011). The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications. *Journal of Business Ethics*, 98(3), 455–466. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0587-x>
- Wiepking, P. (2021). The Global Study of Philanthropic Behavior. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 32(2), 194–203. <https://doi.org/10.1007/s11266-020-00279-6>
- World Bank. (2020). Indonesian Village Governance under the new Village Law (2015-2018): Sentinel Villages Report.